

**KEPENTINGAN NASIONAL TIONGKOK
DALAM KEBIJAKAN *NATIONAL SWORD***

(Skripsi)

Oleh

DHEA CANTIKA NINGRUM

NPM 2256071024



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

**KEPENTINGAN NASIONAL TIONGKOK
DALAM KEBIJAKAN *NATIONAL SWORD***

Oleh

**DHEA CANTIKA NINGRUM
NPM 2256071024**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KEPENTINGAN NASIONAL TIONGKOK DALAM KEBIJAKAN *NATIONAL SWORD*

Oleh

DHEA CANTIKA NINGRUM

Tiongkok merupakan salah satu negara yang menjadi *top tier* importir limbah global. Hingga 2017 Tiongkok masih menjadi importir limbah global, dan menjadi negara tujuan utama bagi beberapa negara untuk mengekspor limbahnya. Setidaknya ada 43 negara yang mengekspor limbah ke Tiongkok. Pada 2016, tercatat 45% limbah global yang diserap Tiongkok. Karena limbah yang melebihi kOleh karena itu, Tiongkok mengesahkan kebijakan *National Sword* pada 1 Januari 2018. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan mengenai apa kepentingan nasional yang dimiliki Tiongkok dalam kebijakan *National Sword* ini. Penelitian ini menggunakan teori realisme serta konsep kepentingan nasional, untuk dapat mengkaji lebih dalam terkait kepentingan nasional Tiongkok. Serta menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Tiongkok dalam kacamata realisme dan kepentingan nasional. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang didukung dengan data sekunder yang di ambil dari situs resmi kementerian lingkungan hidup Tiongkok, berita resmi Tiongkok seperti *Xinhua news*, buku, artikel, dan jurnal terkait, WTO, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan nasional Tiongkok meliputi kepentingan keamanan, ekonomi, kepentingan ideologi, serta kepentingan tata dunia. Limbah impor dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas keamanan, ekonomi negara sehingga Tiongkok memberlakukan kebijakan *National Sword*. Sebagai upaya penyelesaian persoalan ini, dan mengubah sistim pengelolaan limbahnya.

Kata kunci: kebijakan *National Sword*, limbah, impor, kepentingan nasional, Tiongkok

ABSTRACT

CHINA'S NATIONAL INTERESTS WITHIN THE *NATIONAL SWORD* POLICY

By

DHEA CANTIKA NINGRUM

China is one of the top-tier global waste importers. Until 2017, China remained a major global waste importer and served as the primary destination for several countries exporting their waste, with at least 43 nations exporting waste to the country. In 2016, it was recorded that China absorbed 45% of the world's waste. Due to the waste volume exceeding its capacity and severely impacting the environment, China enacted the *National Sword* policy on January 1, 2018. This study aims to address the question of China's national interests regarding the implementation of the *National Sword* policy. Utilizing the theory of realism and the concept of national interest, this research delves deeper into China's national interests and explains the measures taken by China through the lens of realism and national interest. This study employs a descriptive qualitative approach, supported by secondary data obtained from the official website of the Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China, official Chinese news agencies such as Xinhua News, books, related articles and journals, the World Trade Organization (WTO), and other relevant sources. The findings indicate that China's national interests encompass security, economic, ideological, and world order interests. Imported waste was perceived as a threat to the country's security stability and economy, prompting China to enforce the *National Sword* policy as an effort to resolve these issues and transform its waste management system.

Keywords: *National Sword* policy, waste, import, national interest, China

Judul Skripsi : **KEPENTINGAN NASIONAL TIONGKOK
DALAM KEBIJAKAN NATIONAL
SWORD**

Nama Mahasiswa : **Dhea Cantika Ningrum**

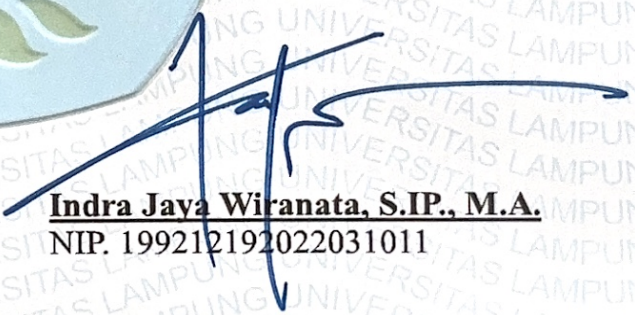
Nomor Pokok Mahasiswa : **2256071024**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

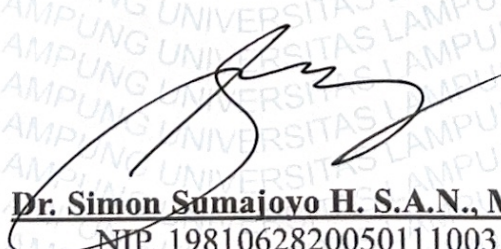
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Hasbi Sidik, S.IP., M.A.
NIP. 197912302014041001


Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.
NIP. 199212192022031011

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Simon Sumajoyo H. S.A.N., M.PA.
NIP. 1981062820050111003

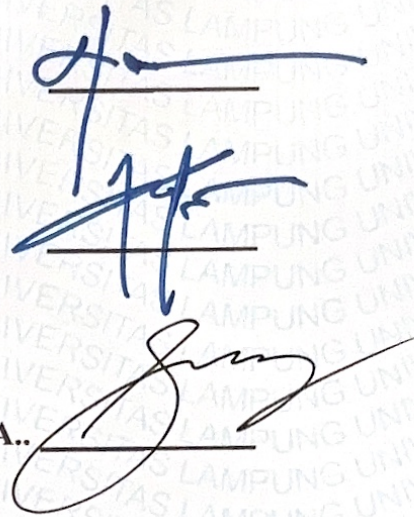
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.

Sekretaris : Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.

Penguji Utama : Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., S.Sos., M.Sc.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 08 Juni 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 08 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Dhea Cantika Ningrum

NPM. 2256071024

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Dhea Cantika Ningrum, yang lahir di Sukoharjo, Kab. Pringsewu, Lampung, 19 Maret 2004. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, dari Ibu Dewi Andri Siswati dan bapak Syaiful. Penulis memulai pendidikan formal di Taman Kanak- Kanak (TK) Aisyah, Sukoharjo pada tahun 2009, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sukoharjo pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sukoharjo pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Sukoharjo tahun 2020. Selanjutnya, di tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi, dan tercatat sebagai Mahasiswa jurusan Hubungan Internasional di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN).

Selama masa perkuliahan, penulis sempat aktif dalam beberapa kegiatan di kampus, atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), di antaranya Republika, English Society (ESO), serta anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJ-HI), selain aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tersebut, penulis juga mengikuti kegiatan magang MBKM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung yang dilakukan selama enam bulan. Mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mekarsari, Kab. Lampung Selatan, Lampung, selama satu bulan. Adapun penulis juga turut aktif dalam kegiatan di luar kampus, yakni kegiatan volunteer mengajar di rumah baca bersama anak-anak.

MOTO

“ So live a life u want to remember”

(Avicii)

“ Success is built on countless failures, so it’s okay to make mistakes. Somestimes those imperfections that make something more unique and beautiful. Dont wait untill you’re ready, because we will never truly ready”

(Dhea Cantika Ningrum)

“Indeed, with hardship (will be) ease”

(Qur’an 94:6)

SANWANCANA

Dengan suka cita dan penuh rasa syukur penulis panjatkan terhadap Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta bimbingannya sehingga penulis dapat sampai ke tahap penyelesaian skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“Kepentingan Nasional Tiongkok dalam Kebijakan *National Sword*”** yang merupakan salah satu pemenuhan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Selama proses penulisan skripsi ini, peneliti mendapat banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih pada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, sekaligus dosen penguji skripsi penulis, yang selalu memberikan arahan, dukungan serta bimbingan selama proses penulisan skripsi.
3. Mba Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik, penulis ucapkan terima kasi karena senantiasa selalu membantu, membimbing, serta memberi dukungan pada penulis selama perkuliahan.
4. Mas Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang senantiasa selalu memberikan arahan, membimbing dan selalu memotivasi penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Mas Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi penulis ucapkan terima kasi, karena selama penulisan skripsi sudah membimbing, serta mengarahkan dengan sabar.
6. Kepada seluruh dosen dan staf jurusan Hubungan Internasional yang sudah memberikan ilmu, mendukung, dan membantu penulis selama perkuliahan

7. Dhea Cantika Ningrum, karena tak pernah menyerah, dan selalu berusaha selama proses pengerjaan skripsi dalam beberapa bulan ini, terima kasi karena tak memilih untuk menyerah, kamu hebat karena sudah sampai sejauh ini.
8. Kepada kakak perempuan, serta keponakan penulis yang senantiasa selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis untuk selalu maju, dan meyakinkan bahwa semuanya tak sesulit yang terlihat, kakak perempuan yang selalu menjadi my role model of life, that i never regret i made her as it, terima kasi sudah menjadi tempat ku berpulang. Seseorang yang menyadarkan arti kehidupan, dan menyadarkan bahwa hidup yang baik, hidup yang selalu diimpikan itu harus di perjuangkan, tak ada yang instan.
9. Kepada orang tua penulis, Dewi Andri Siswati, yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, tak hanya penulis yang hebat, tapi ada doa ibu yang senantiasa menggema dan mengalir. Mbah penulis, Sidik Hendro Warsito yang selalu memberikan dukungan dan keyakinan akan penulis, serta adik penulis, yakni Abdul Ghoffar Al Lathiif yang selalu memberikan dukungan serta semangat.
10. Sahabat penulis sejak SMA, Angelina Gistin Maharani, terima kasi untuk selalu ada dan mendukung penulis, terima kasi sudah menemani dan bertumbuh bersama.
11. Sahabat selama perkuliahan penulis, Tiwa Nadha Azahra dan Zeva Dini Imtiyaz sebagai teman pertama penulis di perkuliahan, terima kasi sudah turut hadir dalam hidup penulis dan menemani, terima kasi mau bertumbuh dan berkembang bersama, selalu ada di kala suka dan duka penulis. Serta dukungan dan motivasi yang sudah diberikan, terima kasi sudah mewarnai masa perkuliahan penulis.
12. Tak lupa, orang-orang baik yang allah kirimkan, yang sudah berkesempatan membantu penulis selama hidup, dalam perkuliahan, serta penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, 08 Juni 2026
Penulis

Dhea Cantika Ningrum
2256071024

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	9
2.2.1 Teori Realisme	9
2.3 Landasan Konseptual.....	11
2.3.1 Konsep Kepentingan Nasional.....	11
2.4 Kerangka Penelitian.....	13
III. METODE PENELITIAN	16
3.1 Jenis Penelitian.....	16
3.2 Fokus Penelitian	16
3.3 Sumber Data.....	17
3.4 Teknik Pengumpulan Data	17
3.5 Teknik Analisis Data.....	18
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Kondisi Lingkungan dan Limbah Tiongkok Akibat Lonjakan Impor	22
4.1.1 Lonjakan Impor Limbah ke Tiongkok	31
4.1.2 Dampak Lingkungan Akibat Lonjakan Impor Limbah	34
4.1.3 Tekanan Domestik Pemerintah Tiongkok.....	45
4.2. Kebijakan National Sword.....	47
4.3. Kepentingan Nasional Tiongkok dalam Kebijakan National Sword.....	55

V. KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data 10 Negara Importir Limbah Dunia oleh World Bank.....	3
Tabel 2. Tabel perbedaan kepentingan nasional, intensitas kepentingan, dan value factors and cost factor	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran	15
Gambar 2. MSW generation in China between 1980 and 2014; (a) total (b) MSWGAPC generation.MSW generation and urban population.....	22
Gambar 3. China's GDP Trend (1981-2020).....	26
Gambar 4. Disposal method for MSW in 2020	28
Gambar 5. System MSW in China.....	29
Gambar 6. Persentase Akses Air Bersih di Tiongkok (%)	39
Gambar 7. Grafik Peningkatan Polusi Udara di Tiongkok	42
Gambar 8. Alur perkembangan kebijakan <i>National Sword</i>	52

DAFTAR SINGKATAN

WTO	: <i>World Trade Organization</i>
MSW	: <i>Municipal Solid Waste</i>
NSP	: <i>National Sword Policy</i>
RHH	: <i>Resource Hunting Hypothesis</i>
PAHs	: <i>Polycyclic Aromatic Hydrocarbons</i>
PHH	: <i>Pollution Haven Hypothesis (PHH)</i>
Cd	: <i>Kadmium</i>
Hg	: <i>Hydrargyrum</i>
Pb	: <i>Plumbum</i>
Zn	: <i>Zink</i>
PE	: <i>Polietilena</i>
PVC	: <i>Polivinil Clorida</i>
PS	: <i>Polistirena</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pesat produksi limbah telah menjadi isu lingkungan yang penting. Berdasarkan statistik, dunia menghasilkan 7-10 miliar ton setiap tahunnya, di mana sekitar 10% diperdagangkan lintas batas melalui perdagangan global, sehingga menimbulkan dampak eksternal yang cukup besar (Martínez, 2022). *Resource huting hypothesis* menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara kekayaan suatu negara dengan produksi limbah per kapitanya, terutama negara maju yang lebih makmur cenderung menghasilkan limbah yang lebih banyak (Huang et al., 2020). Departemen daur ulang negara maju tidak mampu sepenuhnya mengolah limbah mereka, sehingga mereka menjual hasil limbah yang mereka hasilkan ke negara berkembang. Telah terjadi tren pergerakan dalam perdagangan limbah global, dari negara yang memiliki aturan ketat mengenai lingkungan ke negara yang cenderung memiliki aturan lingkungan yang longgar (Kellenberg, 2012). Tren ini sendiri telah menyebabkan peningkatan volume perdagangan limbah lintas batas sebanyak 500% selama 30 tahun terakhir yang memicu kekhawatiran global (Martínez, 2022). Pergerakan limbah, terutama limbah padat tak hanya masalah perlindungan lingkungan dan kesehatan lagi, tetapi tentang masalah yang lebih besar lagi, yakni pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan keadilan lingkungan (Cotta, 2020).

Di antara negara-negara berkembang, selama beberapa dekade, Tiongkok telah menjadi salah satu tujuan utama daur ulang dan pembuangan limbah padat di seluruh dunia, terutama bagi negara-negara maju. Pada tahun 2016, impor Tiongkok mencapai sekitar 40% dari total pasar limbah global (Qu, 2019). Selain itu, impor kertas dan plastik bekas Tiongkok memiliki proporsi lebih besar secara global (Tran et al., 2021). Meskipun menggunakan sampah sebagai perantara yang

terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional, Tiongkok menghadapi hambatan-hambatan, yakni meliputi inefisiensi dalam sistem pengelolaan sampah, selain itu sering ditemukan perdagangan limbah ilegal yang masuk ke Tiongkok, yang dapat menimbulkan tantangan signifikan terhadap tujuan lingkungan dan kesehatan masyarakat Tiongkok (B. Li & Mu, 2024).

Walau demikian, pada 2018, tepatnya pada 1 Januari 2018, pemerintah Tiongkok secara resmi mengeluarkan kebijakan pelarangan impor yang dinamakan *National Sword China Policy*, di mana di dalam kebijakan ini mengatur pelarangan 24 jenis limbah, yang termasuk limbah plastik, potongan, dan scrap, untuk empat klasifikasi polimer: polietilena (PE), polivinil klorida (PVC), polistirena (PS), dan lainnya. Kelompok plastik lainnya mencakup polimer limbah plastik yang belum memiliki kode yang diselaraskan secara internasional yang digunakan untuk pelaporan tetapi mencakup perdagangan polimer. Kebijakan tersebut ialah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok guna melarang impor limbah bahan baku industri dari berbagai negara. Sebelum *National Sword Policy* ini, sebelumnya pada 2013, pemerintah Tiongkok membuat sebuah kebijakan yang mengatur perdagangan limbah daur ulang, yaitu kebijakan *Green Fence*. kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kontaminasi, memperbaiki krisis lingkungan, dan memenuhi tuntutan banyak masyarakatnya sendiri, permasalahan kontaminasi ini dihasilkan dari hasil limbah daur ulang yang di terima dari luar negeri. Karena banyaknya polutan ini yang bercampur dengan berbagai limbah yang beraneka ragam, terdapat juga jenis limbah yang tidak dapat di daur ulang serta kontaminasi zat yang berbahaya dan dapat membahayakan lingkungan (Brooks et al., 2018)

Dalam gambar 1.1 merupakan data top negara importir limbah terbesar, dan hingga 2016 Tiongkok masih menjadi negara importir terbesar, hingga pada 2017, Tiongkok mulai mengumumkan kebijakan impor baru yang membatasi beberapa jenis impor limbah nonindustri.

Tabel 1.1 Data 10 Negara Importir Limbah Dunia oleh World Bank

Reporter	Product Description	Trade Value (USD)	Quantity (Kg)
China	Waste, parings and scrap, of plastics	3,694,711.19	8,801,640.000
Hong Kong, China	Waste, parings and scrap, of plastics	918,716.84	2,877,960.000
United States	Waste, parings and scrap, of plastics	233,788.88	421,003,000
Netherlands	Waste, parings and scrap, of plastics	194,739.97	577,600,000
Germany	Waste, parings and scrap, of plastics	187,527.79	580,258,000

Sumber: wits.worldbank.org

Hal ini tentunya sangat berdampak dan memengaruhi perdagangan limbah global, karena sebelumnya Tiongkok merupakan importir limbah terbesar, dan banyak negara eksportir yang mengalihkan limbah negara mereka ke Tiongkok, tentunya hal ini memaksa negara eksportir untuk mencari jalan alternatif untuk limbah mereka. Tiongkok memperketat aturan mengenai impor limbah, dan meningkatkan sistem daur ulang domestik, dan hanya mengimpor limbah yang hanya mereka butuh kan.

Walau demikian, pemberlakuan kebijakan *National Sword* merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah Tiongkok, karena lonjakan impor yang masuk ke Tiongkok menyebabkan masalah ekologis, hingga kesehatan yang serius, mulai dari pencemaran air, udara, tanah. Tercatat 20% hingga 50% anak-anak di beberapa kota di Tiongkok terdeteksi mengalami gangguan pernapasan karena penurunan kualitas udara, atau dengan kata lain meningkatnya polusi di beberapa kota yang menyebabkan banyak anak yang mengalami gangguan kesehatan, pengelolaan limbah oleh industri, yang tak dikelola dengan benar juga menjadi penyebab pencemaran air. *Global Alliance on Health and Pollution*

mencatat bahwa 9,585 jiwa meninggal akibat pencemaran air. Kepala insinyur kementerian perlindungan lingkungan, Wang Bentai menambahkan, bahwa 10% tanah pertanian pun ikut terdampak, sebagai akibat dari air yang sudah tercemar (Wicaksono et al, 2022)

Impor limbah yang berlebihan dapat menimbulkan persoalan lingkungan yang serius di Tiongkok, hal ini tentu saja merugikan Tiongkok, dan bila tidak ditangani akan menimbulkan masalah yang lebih parah. Proses daur ulang yang tidak sesuai dengan prosedur juga dikhawatirkan akan menimbulkan akibat yang lebih parah, dan menghambat pembangunan keberlanjutan. Pemerintah Tiongkok memberlakukan kebijakan *National Sword*, walau secara resmi diberlakukan pada 1 Januari 2018, namun pada Juli 2017, Tiongkok secara resmi memberitahukan kepada WTO akan keputusan negaranya yang melarang impor 24 jenis limbah padat (B. Li & Mu, 2024). kebijakan ini berfokus pada limbah padat, terutama impor limbah plastik, karena merupakan limbah yang paling banyak masuk. Selain dengan membuat kebijakan *National Sword* ini, Tiongkok juga berupaya untuk meningkatkan sistem daur ulang domestiknya.

1.2 Rumusan Masalah

Sudah puluhan tahun, Tiongkok menjadi negara importir limbah global terbesar, dan berkontribusi cukup besar dalam penyerapan limbah global dunia, yang membuat perdagangan limbah global sangat bergantung pada Tiongkok, terutama negara eksportir limbah, namun karena Tiongkok melakukan impor limbah dalam jumlah yang terlalu besar, dan tidak sesuai dengan kapasitas daur ulang domestik dapat menampung, mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup serius. Tak hanya itu, ditemukan pula impor limbah yang masuk ke Tiongkok secara ilegal, termasuk limbah limbah berbahaya, yang tidak seharusnya masuk. Hal ini yang pada akhirnya mendorong pemerintah Tiongkok membuat kebijakan *National Sword*, pada 1 Januari 2018. Walau sebelumnya Tiongkok juga pernah membuat kebijakan *Green Fence* pada 2013, namun, tidak sepenuhnya mengatasi permasalahan, terutama permasalahan limbah plastik yang masuk secara ilegal. Meskipun penelitian mengenai kebijakan *National Sword* ini sudah diteliti oleh banyak peneliti, namun sebagian besar penelitian terdahulu, fokus penelitiannya cenderung pada dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini ke

perdagangan impor limbah global, sedangkan penelitian yang membahas mengenai kepentingan Tiongkok dalam kebijakan *National Sword* dengan menggunakan teori realisme dan konsep ini belum banyak dibahas. Untuk itu, peneliti berusaha mengkaji lebih dalam mengenai kepentingan Tiongkok dalam kebijakan ini. Sehingga peneliti merumuskan pertanyaan “Apa kepentingan Tiongkok dalam kebijakan *National Sword*?”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan kondisi lingkungan dan limbah Tiongkok akibat lonjakan impor limbah.
2. Menjelaskan kepentingan nasional Tiongkok dalam kebijakan *National Sword*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis, yakni dapat dijadikan referensi untuk penelitian dalam bidang hubungan internasional, serta diharapkan juga dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai apa kepentingan strategis Tiongkok dalam kebijakan *National Sword*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai kebijakan *National Sword* merupakan topik penelitian yang cukup menarik karena berpengaruh cukup besar dalam perdagangan limbah global. Dalam beberapa tahun terakhir sudah banyak peneliti yang meneliti topik ini. Setelah menganalisis penelitian penelitian terdahulu mengenai kebijakan *National Sword*, dengan metode, teori serta konsep yang cukup untuk memahami kebijakan *National Sword* dan menemukan celah penelitian yang akhirnya menjadi fokus penelitian, di mana penelitian ini berfokus pada kepentingan Tiongkok dalam kebijakan *National Sword*. Peneliti menganalisis penelitian penelitian terdahulu dan mengelompokkan penelitian terdahulu yang digunakan ke dalam beberapa *cluster*, di antaranya sebagai berikut.

Cluster pertama, yakni bagaimana Tiongkok merespons lonjakan impor yang masuk ke negaranya. Menurut (Wicaksono et al., 2022), (Vedantam, 2022). Pemberlakuan kebijakan *National Sword* ini dilihat sebagai respons yang diambil oleh Tiongkok atas permasalahan ekologis yang terjadi di negaranya, seperti pencemaran udara, penyumbatan drainase sayangnya kegiatan impor limbah yang dilakukan oleh Tiongkok ini tidak disertai dengan regulasi yang mengatur kegiatan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep *human security*, di mana respons Tiongkok dengan membuat kebijakan ini tak hanya dilihat sebagai akibat dari permasalahan ekologis namun juga persoalan kemanusiaan, permasalahan lingkungan yang terjadi ini dilihat sebagai ancaman, karena mengancam kesehatan. Pernyataan ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan (Unfried & Wang, 2024) yang memaparkan data empiris yang menunjukkan korelasi antara aktivitas impor limbah yang dilakukan Tiongkok dengan tingkat polusi atau kualitas udara, hingga di angka PM 2,5. (Liu et al., 2022) menambahkan bahwa undang undang yang diluncurkan oleh Tiongkok ini memperketat kontrol impor limbah, guna memperbaiki kerusakan ekologis. Hal ini dirasa mempercepat

pemulihan kerusakan lingkungan (Fürst & Feng, 2022). Setelah pemberlakuan kebijakan ini pada 2021 Tiongkok dapat meningkatkan kapasitas daur ulang domestik hingga 30%.

Cluster kedua, yakni dampak kebijakan *National Sword* terhadap global. Pengetatan atau pembatasan impor limbah yang dilakukan oleh Tiongkok, berdampak cukup besar terhadap perdagangan limbah global. (Shi et al, 2021) menjelaskan bahwa, aksi yang dilakukan oleh Tiongkok yang cukup drastis ini benar benar mengubah manajemen perdagangan limbah global, banyak negara eksportir yang bergantung kepada Tiongkok, hal ini menyebabkan para negara eksportir limbah terpaksa harus mencari jalan alternatif dalam pengelolaan limbah mereka, hal ini sangat memengaruhi negara eksportir yang didominasi oleh negara maju. (Vedantam, 2022) serta (Heiges & O'Neill, 2022) Amerika merupakan salah satu negara yang cukup terdampak, di mana Amerika merupakan salah satu eksportir limbah global, hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan limbah di tempat pembuangan akhir, (Tran et al., 2021) mencatat bahwa 92% volume perdagangan limbah global menurun, hal ini menyebabkan negara eksportir harus mengalihkan limbahnya ke negara lain, terutama negara berkembang. (Y. Ren et al., 2020a) dan (Huang et al., 2020) menambahkan bahwa pengalihan limbah ini akan berdampak serius terhadap ekologi jika limbah global banyak di ekspor ke negara dengan kapasitas dan sistem infrastruktur daur ulang yang tak memadai. (Parajuly & Fitzpatrick, 2020) berpendapat bahwa hal tersebut hanya akan menimbulkan permasalahan baru, dan menyebabkan peningkatan peredaran limbah ilegal. (Yoshida, 2022) dan (Wen, 2021) justru berpandangan sebaliknya, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Tiongkok ini mengajarkaypshidan kepada global untuk tak bergantung pada negara lain, dan dapat mengelola limbah domestiknya sendiri.

Cluster ketiga, perubahan tren perdagangan limbah global pasca penetapan kebijakan *National Sword*. Pembatasan impor limbah global yang dilakukan oleh Tiongkok mengubah struktur perdagangan limbah global. (Wang, 2020) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa dampak dari kebijakan Tiongkok ini tak hanya penurunan volume impor perdagangan limbah global, namun, juga memengaruhi dan mengubah komoditas yang diperdagangkan. (Yoshida, 2022)

menambahkan dalam penelitiannya bahwa, selain melakukan pengetatan impor limbah yang masuk ke negaranya, Tiongkok juga menggunakan strategi impor yang berbeda, jika sebelumnya Tiongkok mengimpor plastik mentah, sekarang Tiongkok mengimpor bijih plastik, yang memang diperlukan oleh industri negaranya, dan sulit untuk diproduksi di negaranya. Dalam laporan (OECD, 2025) menjelaskan bahwa walau sempat terjadi penurunan volume impor limbah global, namun rute perdagangan langsung berpindah ke negara negara lain, seperti negara berkembang yang tentu menimbulkan tantangan baru.

Cluster terakhir, yakni tata kelola global, dengan perubahan tren perdagangan limbah global, tentu harus dilakukan pula perubahan tata kelola global, melalui instrumen hukum internasional. (Ishimura et al., 2025) mencatat bahwa BCPWA atau *Basel Convention Plastic Waste Amendments* mengurangi volume perdagangan impor limbah global ke negara berkembang oleh negara negara eksportir mencapai 63,7%. Sedangkan dalam (Gondogdu et al, 2025) menekankan untuk segera mengesahkan *Global Waste Treaty*, dibanding hanya mengandalkan kontrol perbatasan, karena kegiatan pengalihan limbah global oleh negara eksportir ke negara berkembang ini dinilai sebagai *waste colonialism*, dan masih hal yang dapat memicu hal tersebut,

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Realisme

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori realisme sebagai acuan utama untuk menganalisis kepentingan nasional yang dimiliki oleh Tiongkok dalam kebijakan *National Sword*.. Dasar dari teori realisme bersumber dari pemikiran Thucydides (400 SM), Niccolo Machiavelli (1469-1557), dan Thomas Hobbes (1588-1679), yang kemudian dikembangkan oleh Hans J. Morgenthau pasca perang dunia II. Pada awalnya teori ini menekankan aspek *human nature* atau sifat dasar manusia sebagai penyebab perebutan kekuatan di antara negara negara (Ashari, 2020). Teori realisme ialah salah satu teori atau pendekatan yang ada dalam ilmu hubungan internasional, yang di mana teori ini menekankan bahwa sistem internasional itu bersifat anarki dan negara adalah aktor utama yang harus bertindak rasional untuk *survive*, perilaku suatu negara didasarkan pada

kepentingan yang dimiliki oleh negara tersebut, serta dalam rangka memperkuat dan memperluas *power* yang dimilikinya.

Morgenthau dalam bukunya yang berjudul *Politics Among Nations* (1948). Ia berpandangan bahwa tak ada kekuasaan yang lebih besar dari negara, jadi negara harus mengandalkan *power* yang dimilikinya untuk tetap bertahan, yang pada akhirnya yang dapat menjamin dan menentukan keamanan negara atau eksistensi suatu negara, hanyalah negara itu sendiri. Dalam bukunya, Hans menekankan bahwa politik suatu negara didasari kuat oleh kepentingan nasionalnya, dan moralitas dinilai bersifat relatif dan tergantung pada situasi. Hal ini menandakan bahwa negara tidak menolak moralitas, namun moralitas cenderung relatif dan menyesuaikan atau dipengaruhi oleh kepentingan negara. Hans menggambarkan kepentingan nasional sebagai kerangka kekuasaan, dan menjadi pertimbangan untuk menganalisis kebijakan luar negeri yang akan di rumuskan, maka dari itu, setiap perilaku atau tindakan suatu negara dapat diartikan sebagai bentuk pertahanan dan meningkatkan kekuasaannya, (J. Morgenthau, 1948).

Kemudian Hans menegaskan kembali hal ini dalam bukunya yang berjudul *In Defense of the National Interest* (1951), bahwa moralitas dalam dunia internasional bersifat relatif dan tak dapat diterapkan secara global, karena harus mempertimbangkan kembali secara rasional mengenai kondisi dan kepentingan yang dimiliki negara. Hans mengkritik pendekatan idealisme klasik yang Tidak mementingkan kepentingan negara dan hanya berfokus pada moral universal, sedangkan realitas nya, setiap negara selalu mengejar kepentingannya. Realisme hadir untuk menjelaskan perilaku negara, yakni untuk melengkapi keterbatasan idealis, yang hanya berfokus pada moral universal, di mana realisme menempatkan rasionalitas, kepentingan, serta kekuasaanlah unsur utama untuk memahami perilaku suatu negara (J. Morgenthau, 1951).

Khasan Ashari (2020) juga menjelaskan mengenai realisme, yang dibangun atas empat prinsip utama, yakni pandangan yang pesimis terhadap sifat dasar manusia, keyakinan bahwa sebenarnya hubungan internasional itu konfliktual, menekankan aspek keamanan nasional, yakni *national security and*

state survival, dan pandangan bahwa karakteristik politik domestik dan politik internasional itu jauh berbeda. Khasan juga menambahkan bahwa realisme memiliki tiga konsep utama, yakni, *survival, statism, and self help* (Ashari, 2020)

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Konsep Kepentingan Nasional

Nuechterlein mendefinisikan kepentingan nasional sebagai persepsi para pengambil keputusan mengenai apa yang paling baik bagi negara dalam interaksinya dengan lingkungan internasional. Ia membagi kepentingan nasional ke dalam empat kategori utama: kepentingan pertahanan (*defense interests*), kepentingan ekonomi (*economic interests*), kepentingan tatanan dunia (*world order interests*), dan kepentingan ideologi (*ideological interests*). Sejarah perkembangan konsep ini menunjukkan pergeseran dari pandangan Morgenthau dalam *In Defense of the National Interest* (1951) yang bersifat defensif dan berpusat pada keamanan wilayah, menuju pandangan yang lebih multidimensi seperti yang dikemukakan Nuechterlein (1976), yang mencakup dimensi ekonomi dan sosial.

Morgenthau menekankan dalam *Politics Among Nations* (1948) bahwa kepentingan nasional memiliki unsur permanen, yaitu perlindungan terhadap integritas fisik, politik, dan budaya bangsa. Sementara itu, Nuechterlein (1976) menekankan pada "matriks intensitas" kepentingan, yang terdiri dari kepentingan survival (kelangsungan hidup), vital (sangat penting), major (penting), dan peripheral. Nuechterlein menekankan seberapa jauh sebuah negara bersedia mengambil risiko untuk memperjuangkan kepentingan tersebut. Tiongkok merupakan salah satu importir limbah terbesar dunia. Membuat banyak negara yang mengalihkan limbah negaranya, yakni dengan mengekspor limbah mereka ke Tiongkok, dan menyebabkan *dependency* global untuk mengalihkan limbah mereka, walau demikian hal ini juga menguntungkan Tiongkok karena beberapa jenis limbah memang dibutuhkan oleh Tiongkok.

Namun, karena volume impor limbah yang semakin meningkat, membuat permasalahan baru di Tiongkok, seperti permasalahan lingkungan, keamanan, dan menyebabkan tekanan domestik, dan dengan volume yang semakin meningkat,

dan di luar kapasitas daur ulang domestik Tiongkok, membuat akhirnya negara ini kewalahan. Yong Deng, dalam bukunya yang berjudul *The China Quarterly: The Chinese Conception of National Interests in Internasional Relations*. Dalam bukunya ini Yong Deng menekankan bahwa *national interest* merupakan pedoman atau acuan yang dipegang kukuh oleh Tiongkok, sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan luar negerinya, dan juga sebagai penentu pengambilan tindakan di tingkat internasional. Yong Deng percaya bahwa sistem *national interest* ini dipengaruhi oleh pendekatan realisme, yang dalam pendekatan ini berpandangan bahwa sistem internasional ini bersifat anarki, di mana negara harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk tetap *survive*. Yong Deng menjelaskan dalam bukunya dalam konteks Tiongkok, kepentingan nasional merupakan salah satu upaya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Kedaulatan dipandang sebagai prinsip yang tak bisa diganggu gugat, sehingga Tiongkok cenderung menolak intervensi pihak luar. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dipegang Tiongkok, seperti saling menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain (Deng, 1998)

Selain faktor pandangan tersebut, Yong Deng juga menekankan akan bahwa faktor historis juga memengaruhi cara pandang Tiongkok. Khususnya pada periode “seratus tahun penghinaan” membuat Tiongkok cukup sensitif terhadap ancaman dari luar. Karena hal ini, Tiongkok memandang hubungan internasional sebagai kompetisi yang tidak sepenuhnya kooperatif. Karena negara harus terus menjaga posisinya agar tidak dirugikan. Namun sejak era reformasi pasca Mao, terdapat beberapa perubahan dalam orientasi kepentingan nasional Tiongkok. Jika sebelumnya fokusnya lebih bersifat ideologis, kini lebih bersifat realistik, dan mulai berorientasi pada pembangunan ekonomi, teknologi, pembangunan nasional menjadi fokus utama, dibanding ideologi (Deng, 1998)

Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk menganalisis lebih mendalam, bagaimana upaya Tiongkok untuk menyelesaikan permasalahan yang hadir, dan bagaimana Tiongkok dapat *survive* dari permasalahan yang terjadi, seperti permasalahan lingkungan, kesehatan, tekanan publik. Dan hal ini juga berdampak besar terhadap sistem perdagangan limbah global. Yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya ialah bagaimana peneliti

mencoba menganalisis secara mendalam mengenai apa alasan pemerintah Tiongkok membatasi impor limbah ke negaranya dan mengesahkan kebijakan *National Sword*. dengan menggunakan teori *realism* Belum banyak penelitian yang meneliti mengenai kebijakan *National Sword* yang menggunakan teori ini,

2.4 Kerangka Penelitian

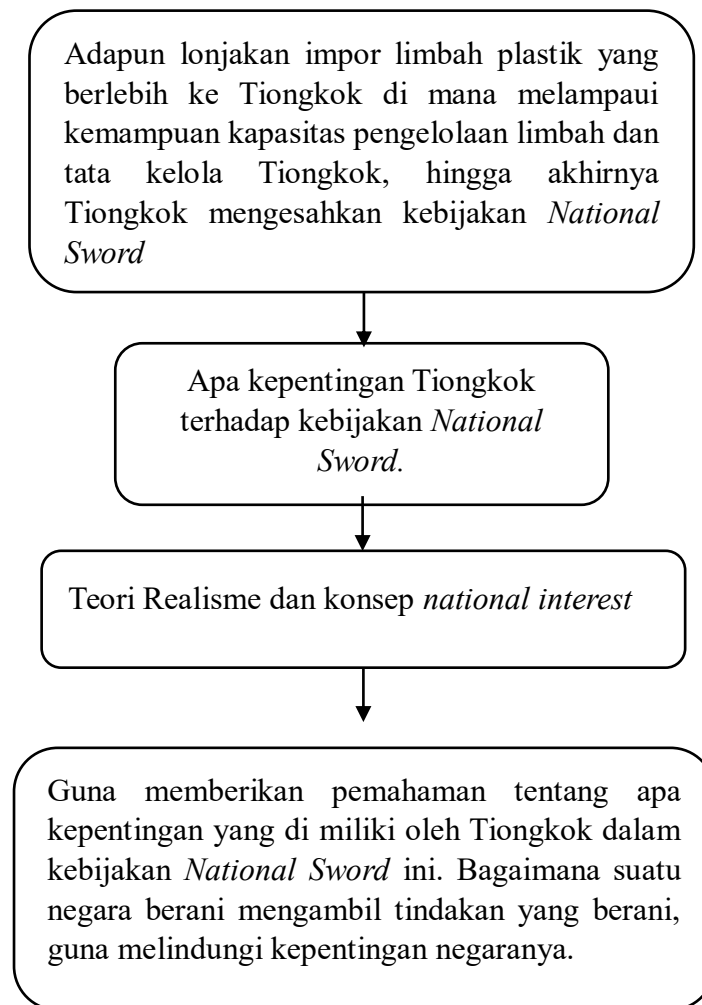
Dalam beberapa dekade ini, tren pengalihan limbah negara maju ke negara mulai meningkat yang cukup signifikan. Banyak negara maju yang menjadi eksportir limbah, hal ini dikarenakan biaya pengelolaan limbah di negara mereka tergolong tidak ekonomis, dan memakan biaya yang cukup besar untuk mengolah limbahnya sendiri. Dalam hal ini Tiongkok cukup berperang penting, karena menjadi salah satu negara yang menjadi importir limbah terbesar global. Tingginya permintaan limbah dari Tiongkok ini, akhirnya banyak negara, terutama negara maju, yang mengekspor limbah mereka pada Tiongkok, hal inilah yang membuat negara eksportir limbah banyak yang bergantung pada Tiongkok (Shi et al., 2021)

Aktivitas impor limbah yang dilakukan oleh Tiongkok ini yang menjadi bumerang bagi Tiongkok sendiri, karena terlalu banyak menerima impor limbah global, yang tak sesuai dengan kapasitas pengelolaan limbah domestiknya membuat mereka over impor, dan berdampak terhadap domestik. Mulai dari permasalahan lingkungan, kesehatan, dan sebagainya, yang membahayakan masyarakatnya sendiri, hal ini juga diperparah dengan banyaknya limbah ilegal yang masuk ke Tiongkok. Hingga akhirnya Tiongkok membuat kebijakan *National Sword* (Shi et al., 2021)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori realisme dan konsep kepentingan nasional. Penggunaan teori realisme digunakan untuk menjelaskan perilaku Tiongkok. Realisme memandang bahwa sistem internasional bersifat anarki, negara satu satunya aktor rasional, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan, serta memastikan keamanan dan keberlangsungan negaranya. Sehingga negara akan mengambil tindakan tegas jika suatu hal dirasa berpotensi untuk menjadi ancaman bagi negaranya. Serta konsep kepentingan nasional juga digunakan untuk dapat menjelaskan kepentingan nasional yang dimiliki Tiongkok

dalam kebijakan *National Sword*. Menurut Donald E. Nuechterlein, setidaknya terdapat tiga klasifikasi utama kepentingan nasional, yakni *defense interests* (kepentingan bersama), *economic interests* (kepentingan ekonomi), dan *world order interests* (kepentingan tatanan dunia) (Nuechterlein, 1976b)

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir yang menjadi acuan peneliti untuk lebih memahami dan menjelaskan fenomena yang diambil, agar alur penelitian menjadi lebih mudah dipahami dan sistematis, untuk memudahkan proses analisis. Kerangka pemikiran tersusun atas latar belakang masalah, teori yang digunakan, serta fenomena yang diteliti. Kerangka penelitian juga menghubungkan kebijakan *National Sword* dengan teori dan konsep yang digunakan, yakni bagaimana kepentingan yang dimiliki suatu negara dapat memengaruhi tindakan atau kebijakan suatu negara. Untuk itu peneliti bertujuan untuk meneliti kepentingan yang dimiliki Tiongkok dalam kebijakan *National Sword*.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran.

Sumber: Diolah oleh peneliti demi keperluan penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan menjelaskan secara komprehensif apa kepentingan Tiongkok dalam kebijakan *National Sword*, seperti yang dikemukakan oleh Sandelowski (2000) yang menjelaskan bahwa kualitatif deskriptif dapat memahami suatu fenomena dengan lebih komprehensif, berbeda dengan jenis kualitatif yang lain seperti *grounded theory*, fenomenologi, dan etnografi. Hal ini dikarenakan kualitatif deskriptif yang fokus untuk menjawab pertanyaan 'apa, mengapa dan di mana' melalui suatu fenomena. Pendekatan ini mencakup proses pengumpulan data secara langsung dari sumber yang kredibel, analisis data secara induktif untuk menemukan pola pola, serta interpretasi makna oleh peneliti berdasarkan konteks.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus peneliti dalam penelitian ini ialah apa kepentingan Tiongkok dalam kebijakan *National Sword*. Kebijakan yang diberlakukan sejak Januari 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons atau tindakan Tiongkok yang memberlakukan kebijakan *National Sword*, serta juga menganalisis kepentingan Tiongkok di balik kebijakan ini, dengan menggunakan teori realisme dan konsep kepentingan nasional. Teori realisme menekankan bahwa sistem internasional itu bersifat anarki dan negara adalah aktor utama yang harus bertindak rasional untuk *survive*, perilaku suatu negara didasarkan pada kepentingan yang dimiliki oleh negara tersebut.

Selain itu, dalam penelitian ini digunakan pula konsep kepentingan nasional, oleh Morgenthau dan Nuechterlein. Morgenthau menekankan dalam *Politics Among Nations* (1948) bahwa kepentingan nasional memiliki unsur permanen, yaitu perlindungan terhadap integritas fisik, politik, dan budaya bangsa. Sementara itu, Nuechterlein (1976) menekankan pada "matriks intensitas" kepentingan, yang terdiri dari kepentingan *survival* (kelangsungan hidup), *vital* (sangat penting),

major (penting), dan peripheral. Nuechterlein menekankan seberapa jauh sebuah negara bersedia mengambil risiko untuk memperjuangkan kepentingan tersebut.

apa alasan pemerintah Tiongkok membatasi impor limbah ke negaranya dan mengesahkan kebijakan *National Sword*, karena sebelumnya Tiongkok pernah membuat kebijakan serupa, yakni *green fence* pada tahun 2013. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa Tiongkok mengesahkan kebijakan mengenai lingkungan lagi, apa yang melatarbelakangi kebijakan ini, dengan menggunakan teori realisme dan konsep kepentingan nasional.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama dengan menggunakan berbagai sumber terkait *National Sword Policy*, data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, di antaranya ialah

1. Website resmi pemerintah Tiongkok, tepatnya kementerian lingkungan hidup, yang mengeluarkan pernyataan tentang pemberlakuan kebijakan *National Sword* oleh Tiongkok, yang dimulai pada 2018 (https://english.mee.gov.cn/News_service/media_news/202011/t20201130_810429.shtml?utm_source=chatgpt.com), digunakan pula sumber dari lingkungan hidup Tiongkok, mengenai jenis limbah yang mulai dibatasi oleh Tiongkok (https://english.mee.gov.cn/News_service/media_news/201804/t20180419_434969.shtml?utm_source=chatgpt.com),
2. Berita resmi yang dirilis WTO, yang memberitakan tanggapan negara negara lain mengenai kebijakan *National Sword* yang membatasi impor limbah ke Tiongkok.
3. Berita yang dirilis oleh media nasional Tiongkok, yakni Xinhua news. Memberitakan kebijakan ini serta mengeluarkan laporan mengenai dampak yang dialami negara lain, seperti Amerika atas kebijakan ini.
4. Data yang dikeluarkan oleh *World Trade Bank*, mengenai tren perdagangan limbah global.
5. Penggunaan sumber yang berasal dari artikel ilmiah, jurnal akademik, serta buku yang relevan dengan kebijakan Tiongkok ini.\

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memperkaya data dalam penelitian ini, yang terfokus pada kepentingan Tiongkok dalam *National Sword*. Dengan menggunakan teknik studi dokumentasi, dengan mengumpulkan dokumen tertulis, mulai dari pernyataan resmi Tiongkok, media nasional Tiongkok, berita yang dikeluarkan oleh WTO, artikel ilmiah, jurnal akademik, hingga penelitian-penelitian terdahulu, yang juga berguna untuk mengumpulkan data serta mencari informasi yang belum ada atau belum banyak di bahas di penelitian sebelumnya, serta buku buku yang terkait dengan kebijakan ini. Studi dokumentasi merupakan metode yang penting untuk mengumpulkan data dari dokumen yang telah ada baik digital maupun cetak, guna memahami fenomena sosial dalam konteks alaminya, serta metode ini membantu peneliti mendapatkan data yang sebenarnya, dan buka dokumen fiktif yang tak diketahui kebenarannya, agar dapat memahami konteks sosial dalam konteks alaminya (Cresswell & Creswell, 2018).

3.5 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2014). Teknik ini digunakan untuk membantu peneliti mengolah berbagai data yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah Tiongkok, laporan organisasi internasional, jurnal akademik, artikel ilmiah, berita, serta berbagai sumber lain yang berkaitan dengan kebijakan National Sword dan permasalahan impor limbah di Tiongkok.

Tahap pertama adalah reduksi data. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemilihan, penyederhanaan, serta pemfokusan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan keterkaitannya dengan fokus penelitian, yaitu kepentingan nasional Tiongkok dalam kebijakan National Sword. Dalam proses ini, peneliti mengelompokkan data ke dalam beberapa tema utama, seperti perkembangan impor limbah ke Tiongkok, kondisi lingkungan dan pengelolaan limbah domestik sebelum penerapan National Sword, dampak limbah impor terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta kebijakan pemerintah Tiongkok dalam mengatasi

permasalahan tersebut. Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi berbagai data yang menunjukkan adanya pertimbangan keamanan, ekonomi, lingkungan, maupun stabilitas sosial yang melatarbelakangi penerapan kebijakan National Sword. Melalui proses reduksi data, informasi yang tidak berkaitan secara langsung dengan fokus penelitian disisihkan sehingga analisis dapat lebih terarah.

Tahap kedua adalah penyajian data. Setelah data direduksi dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu, data kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis agar memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data. Penyajian data dilakukan dengan menggambarkan kondisi pengelolaan limbah dan lingkungan di Tiongkok, perkembangan impor limbah yang menjadikan Tiongkok sebagai tujuan utama perdagangan limbah global, serta berbagai dampak yang muncul akibat masuknya limbah impor dalam jumlah besar. Penyajian data juga dilakukan dengan menunjukkan keterkaitan antara permasalahan limbah impor dengan respons pemerintah Tiongkok melalui kebijakan National Sword. Pada tahap ini, data empiris yang telah diperoleh disusun secara kronologis dan tematis sehingga memudahkan peneliti dalam melihat pola, hubungan sebab-akibat, serta perubahan kebijakan yang terjadi.

Selanjutnya, data yang telah disajikan dianalisis menggunakan teori realisme dan konsep kepentingan nasional Donald E. Nuechterlein. Perspektif realisme digunakan untuk memahami Tiongkok sebagai aktor negara yang bertindak secara rasional dalam upaya melindungi kepentingan nasionalnya ketika menghadapi ancaman atau permasalahan yang dianggap dapat memengaruhi keamanan, stabilitas, dan pembangunan nasional. Berdasarkan perspektif tersebut, data kemudian dianalisis dengan mengidentifikasi kepentingan nasional yang ingin dilindungi melalui kebijakan National Sword. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan kategori kepentingan nasional menurut Nuechterlein, yaitu *defence interests*, *economic interests*, *world order interests*, dan *ideological interests*, untuk mengetahui bentuk kepentingan yang paling dominan dalam kebijakan tersebut.

Selain mengidentifikasi bentuk kepentingan nasional, peneliti juga menganalisis tingkat intensitas kepentingan yang dimiliki Tiongkok terhadap permasalahan limbah impor. Analisis dilakukan dengan melihat tingkat urgensi isu

berdasarkan klasifikasi *survival interests*, *vital interests*, *major interests*, dan *peripheral interests*. Peneliti kemudian menilai posisi permasalahan limbah impor dalam hierarki kepentingan nasional Tiongkok berdasarkan tingkat ancaman yang ditimbulkan terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, serta keberlanjutan pembangunan nasional. Dengan demikian, analisis tidak hanya menjelaskan kepentingan apa yang ingin dilindungi Tiongkok, tetapi juga seberapa penting kepentingan tersebut bagi negara.

Untuk memperkuat analisis, peneliti juga mengkaji *value factors* dan *cost factors* yang memengaruhi pengambilan kebijakan *National Sword*. *Value factors* digunakan untuk melihat nilai strategis permasalahan limbah impor bagi Tiongkok, seperti dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan stabilitas sosial. Sementara itu, *cost factors* digunakan untuk menganalisis berbagai biaya dan risiko yang harus dipertimbangkan pemerintah Tiongkok, baik apabila kebijakan diterapkan maupun apabila permasalahan limbah impor terus dibiarkan. Melalui analisis tersebut, peneliti dapat menjelaskan alasan mengapa pemerintah Tiongkok memandang isu limbah impor sebagai isu yang penting dan akhirnya mengambil kebijakan *National Sword* sebagai upaya melindungi kepentingan nasionalnya.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, seluruh data dan hasil analisis yang telah disusun kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti mengidentifikasi pola hubungan antara permasalahan limbah impor, kepentingan nasional Tiongkok, serta kebijakan *National Sword* yang diterapkan pemerintah. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi dengan membandingkan berbagai sumber data yang digunakan dalam penelitian untuk memastikan konsistensi dan keabsahan temuan. Melalui proses verifikasi tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai kepentingan nasional Tiongkok dalam kebijakan *National Sword* berdasarkan perspektif realisme dan konsep kepentingan nasional Donald E. Nuechterlein.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepentingan nasional Tiongkok dalam kebijakan *National Sword*, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah Tiongkok untuk melindungi dan memperkuat kepentingan nasionalnya di tengah meningkatnya tekanan lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik akibat lonjakan impor limbah dari berbagai negara. Selama beberapa dekade, Tiongkok menjadi tujuan utama ekspor limbah dunia karena memiliki kapasitas industri yang besar dan kebutuhan tinggi terhadap bahan baku sekunder. Namun, di balik manfaat ekonominya, impor limbah dalam jumlah besar menimbulkan berbagai persoalan serius, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, meningkatnya risiko kesehatan masyarakat, munculnya industri daur ulang informal yang tidak terkendali, serta tekanan publik yang semakin kuat terhadap pemerintah. Dalam konteks tersebut, *National Sword* tidak hanya dapat dipahami sebagai kebijakan lingkungan, tetapi juga sebagai strategi negara untuk menjaga stabilitas domestik, meningkatkan kualitas pembangunan nasional, dan memperkuat posisi Tiongkok dalam sistem internasional.

Latar belakang munculnya kebijakan *National Sword*., kebijakan ini lahir sebagai respons atas akumulasi permasalahan yang ditimbulkan oleh ketergantungan Tiongkok terhadap limbah impor. Sejak awal 1990-an, Tiongkok mengimpor limbah plastik, kertas, logam, dan elektronik sebagai bahan baku industri. Akan tetapi, lemahnya pengawasan terhadap tingkat kontaminasi menyebabkan banyak limbah yang masuk tidak dapat didaur ulang dan justru menjadi sumber pencemaran lingkungan. Kondisi ini diperburuk oleh praktik pengolahan informal yang menggunakan metode pembakaran terbuka, pembuangan residu ke sungai, dan penggunaan bahan kimia berbahaya. Selain itu,

meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan serta komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Xin Jinping untuk membangun peradaban ekologis mendorong negara mengambil langkah yang lebih tegas. Oleh karena itu, *National Sword* diterapkan sebagai kebijakan untuk menghentikan masuknya *foreign garbage* dan mengurangi beban ekologis yang selama ini ditanggung oleh Tiongkok.

Kepentingan nasional Tiongkok yang mendasari kebijakan *National Sword*. Berdasarkan analisis menggunakan konsep kepentingan nasional dan teori Realisme, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut didorong oleh empat kepentingan utama. Pertama, kepentingan lingkungan, yaitu upaya negara untuk memulihkan kualitas tanah, air, dan udara serta mengurangi kerusakan ekologis akibat impor limbah. Kedua, kepentingan kesehatan masyarakat, yaitu perlindungan terhadap masyarakat dari paparan zat berbahaya yang dihasilkan dari proses daur ulang yang tidak aman. Ketiga, kepentingan ekonomi, yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mendorong pemanfaatan limbah domestik, dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor yang berkualitas rendah. Keempat, kepentingan politik, yaitu menjaga legitimasi pemerintah, merespons tuntutan publik, dan menunjukkan kapasitas negara dalam melindungi kesejahteraan rakyat. Kelima yakni, kebutuhan akan lahan. Keempat kepentingan tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa *National Sword* merupakan kebijakan strategis yang dirancang untuk memperkuat ketahanan nasional Tiongkok secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa beberapa aspek yang dikemukakan oleh Nuechterlein, terdapat beberapa aspek yang masuk dan sesuai dalam kepentingan nasional Tiongkok ini. Dalam kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Nuechterlein, terdapat tiga aspek yang perlu di *highlight*, yakni kepentingan nasional, intensitas kepentingan, serta *value and cost factors*. Pada aspek kepentingan nasional, kepentingan Tiongkok ini masuk dalam kategorikan ke dalam *defence, economic interests*. *Defence interests*, hal ini dikarenakan isu atau permasalahan limbah Tiongkok di anggap sebagai hal yang dapat mengancam negara, walau tak sampai mengancam kestabilan negara, *economic interests*, hal ini terjadi karena aktivitas impor limbah yang dilakukan

pengusaha Tiongkok ini melemahkan usaha limbah domestik, dan biaya yang dibutuhkan Tiongkok untuk mendaur ulang limbah yang sudah *over*. Selanjutnya, permasalahan Tiongkok ini tak sepenuhnya dapat dikategorikan ke dalam *world order interest*, karena tidak mengubah tatanan global, hanya mengubah perdagangan limbah global. Dalam aspek intensitas kepentingan, Tiongkok dapat dikategorikan dalam *vital interests*, walau cukup membahayakan namun permasalahan limbah Tiongkok ini belum termasuk ke level yang sangat berbahaya, namun membuat Tiongkok mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Dalam perspektif Hubungan Internasional, temuan penelitian ini menegaskan bahwa negara tetap merupakan aktor utama yang bertindak rasional untuk mempertahankan keamanan dan kepentingan nasionalnya. Sesuai dengan asumsi teori Realisme, Tiongkok memanfaatkan kedaulatan dan kapasitas negara untuk mengendalikan aktivitas ekonomi yang dianggap mengancam stabilitas domestik. Kebijakan *National Sword* menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dapat menjadi bagian penting dari strategi negara dalam menjaga kekuatan nasional. Tiongkok tidak lagi bersedia menanggung biaya ekologis dari sistem perdagangan limbah global, melainkan menggunakan kebijakan domestik untuk mengubah struktur internasional sesuai kepentingannya. Dengan demikian, *National Sword* menjadi bukti bahwa kebijakan lingkungan dapat berfungsi sebagai instrumen politik yang memperkuat posisi negara di tingkat domestik maupun global.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kepentingan nasional utama Tiongkok dalam kebijakan *National Sword* adalah menciptakan pembangunan nasional yang lebih aman, sehat, efisien, dan berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan melindungi lingkungan hidup, menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan efisiensi ekonomi, memperkuat legitimasi politik pemerintah, serta mengurangi ketergantungan terhadap limbah impor. Dengan menempatkan kepentingan domestik sebagai prioritas utama, Tiongkok berhasil mengubah arah kebijakan pengelolaan limbah nasional sekaligus memengaruhi tata kelola limbah global. Oleh karena itu, *National Sword* dapat dipahami sebagai manifestasi nyata dari upaya Tiongkok menggunakan kekuatan negara untuk mempertahankan dan memperkuat kepentingan nasionalnya di tengah dinamika sistem internasional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan *National Sword* muncul sebagai respons terhadap meningkatnya masalah lingkungan dan kesehatan akibat impor limbah dalam jumlah besar ke Tiongkok. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh pencemaran yang meluas, tekanan masyarakat, serta komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Melalui *National Sword*, Tiongkok menghentikan praktik penerimaan limbah berkontaminasi tinggi dan menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional.

Kebijakan ini didorong oleh kepentingan nasional yang mencakup aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, ekonomi, dan politik. Dalam perspektif teori Realisme, Tiongkok bertindak sebagai aktor rasional yang menggunakan kedaulatannya untuk melindungi stabilitas domestik dan memperkuat kapasitas nasional. *National Sword* tidak hanya menyelesaikan persoalan internal, tetapi juga mengubah perdagangan limbah global dan menegaskan posisi Tiongkok sebagai negara yang mampu membentuk dinamika internasional melalui kebijakan domestik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap bahwa kebijakan *National Sword* dapat dipahami tidak hanya sebagai kebijakan lingkungan semata, tetapi juga sebagai strategi nasional Tiongkok dalam melindungi kepentingan negara secara menyeluruh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam memahami bagaimana isu lingkungan dapat menjadi bagian dari strategi negara untuk mempertahankan keamanan dan kekuatan nasional.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan teori lain, seperti Ekonomi Politik Internasional, *Green Theory*, *Ecological Modernization*, kebijakan luar negeri dan sebagainya, agar diperoleh perspektif yang lebih luas mengenai hubungan antara kebijakan lingkungan, perdagangan internasional, dan politik global. Penelitian lanjutan juga dapat membahas bagaimana negara lain mengadopsi kebijakan Tiongkok maupun respons Tiongkok ini, bagaimana suatu negara harus bertindak

ketika stabilitas, serta keamanan negaranya terganggu. Karena masih banyak negara yang belum *aware* akan lingkungan hidup mereka, serta regulasi impor limbah ataupun lingkungan yang rendah, terutama di negara berkembang, yang membuat negara mereka lebih mudah menjadi sasaran para oknum ilegal.

Selain itu, diharapkan pula untuk peneliti selanjutnya untuk membahas lebih detail dan mendalam mengenai adakah upaya yang dilakukan oleh Tiongkok ini untuk mengurangi risiko yang terjadi akibat dari pembatasan serta pelarangan impor limbah global ke Tiongkok, karena pada penelitian ini peneliti belum menemukan upaya yang dilakukan Tiongkok dalam mengurangi risiko dari dampak yang ditimbulkan dari kebijakan negaranya.

Bagi pemerintah Indonesia, penelitian ini dapat menjadi pelajaran bahwa pengelolaan limbah impor harus dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah Indonesia menjadi tujuan pemindahan limbah dari negara lain, beberapa kebijakan memang sudah diupayakan oleh pemerintah, namun belum terlalu kuat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas pengawasan di pelabuhan, dan mengembangkan sistem pengelolaan sampah domestik yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat melindungi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat sekaligus menjaga kepentingan nasionalnya di tengah dinamika perdagangan limbah internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, Khasan. (2020). *Kamus hubungan internasional dan Diplomasi* (First Edition). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Brooks, A. L., Wang, S., & Jambeck, J. R. (2018). *The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade*. <http://advances.sciencemag.org/>
- Chai, B., Wei, Q., She, Y., Lu, G., Dang, Z., & Yin, H. (2020). Soil microplastic pollution in an e-waste dismantling zone of China. *Waste Management, 118*, 291–301. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.08.048>
- Deng, Y. (1998). The Chinese Conception of National Interests in International Relations. *China Quarterly*, (154), 308–329. <https://doi.org/10.1017/s0305741000002058>
- Gu, B., Jiang, S., Wang, H., Wang, Z., Jia, R., Yang, J., He, S., & Cheng, R. (2017). Characterization, quantification and management of China's municipal solid waste in spatiotemporal distributions: A review. In *Waste Management* (Vol. 61, pp. 67–77). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.11.039>
- Huang Ningxin, Y. G. Z. (2026). *Carbon footprint and its cross-province transfer of plastic waste management system in China*.
- J. Morgenthau, H. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle For Power and Peace*.
- J. Morgenthau, H. (1951). *In Defense of the National Interest*.
- Japan P&I Club. (2018). *China – Implementation of Stricter Regulation on Solid Waste Importation from 2018*. <https://www.piclub.or.jp/wp-content/uploads/2018/06/No.967-China-Amended-Regulation-on-Solid-Waste-Importation-No.2-.pdf>

- Juan Shan. (2016). *Cancer Agent found in 44 Cities Drinking Water*.
- Kurniawan, T. A., Liang, X., O'callaghan, E., Goh, H., Othman, M. H. D., Avtar, R., & Kusworo, T. D. (2022). Transformation of Solid Waste Management in China: Moving towards Sustainability through Digitalization-Based Circular Economy. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 14, Number 4). MDPI. <https://doi.org/10.3390/su14042374>
- Leberaton, L. , Zwet Joost, Damsteeg, J., Slat, B., Andrady, A., & Reisser, J. (2017). *River Plastic Emissions to The World's Oceans*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/ncomms15611>
- Lee, R. P., Meyer, B., Huang, Q., & Voss, R. (2020). Sustainable waste management for zero waste cities in China: Potential, challenges and opportunities. In *Clean Energy* (Vol. 4, Number 3, pp. 169–201). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/ce/zkaa013>
- Li, B., Alleyne, A., Zhang, Z., & Mu, Y. (2021). Sustainability and waste imports in China: Pollution haven or resources hunting. *Sustainability (Switzerland)*, *13*(2), 1–21. <https://doi.org/10.3390/su13020932>
- Li, B., & Mu, Y. (2024). Impact of China's *National Sword* Policy on Waste Import Margins: A Difference-in-Differences Approach. *Sustainability (Switzerland)*, *16*(2). <https://doi.org/10.3390/su16020776>
- Li, W., & Achal, V. (2020). Environmental and health impacts due to e-waste disposal in China – A review. *Science of the Total Environment*, *737*. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139745>
- MEE CHINA. (2018). *China announces import ban on 32 types of solid waste*. https://english.mee.gov.cn/News_service/media_news/201804/t20180419_434969.shtml?utm_source
- MEE CHINA. (2020). *China to ban all imports of solid waste from 2021*. https://english.mee.gov.cn/News_service/media_news/202011/t20201130_810429.shtml?utm_source

- Ni, H. G., Lu, S. Y., Mo, T., & Zeng, H. (2016). Brominated flame retardant emissions from the open burning of five plastic wastes and implications for environmental exposure in China. *Environmental Pollution*, 214, 70–76. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.03.049>
- Ren, S., Wang, K., Zhang, J., Li, J., Zhang, H., Qi, R., Xu, W., Yan, C., Liu, X., Zhang, F., Jones, D. L., & Chadwick, D. R. (2024). Potential sources and occurrence of macro-plastics and microplastics pollution in farmland soils: A typical case of China. In *Critical Reviews in Environmental Science and Technology* (Vol. 54, Number 7, pp. 533–556). Taylor and Francis Ltd. <https://doi.org/10.1080/10643389.2023.2259275>
- Ren, Y., Shi, L., Bardow, A., Geyer, R., & Suh, S. (2020a). Life-cycle Environmental Implications of China's Ban on Post-Consumer Plastics Import. *Resources, Conservation and Recycling*, 156. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104699>
- Ren, Y., Shi, L., Bardow, A., Geyer, R., & Suh, S. (2020b). Life-cycle environmental implications of China's ban on post-consumer plastics import. *Resources, Conservation and Recycling*, 156. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104699>
- Song, N., McLellan, I., Liu, W., Wang, Z., & Hursthouse, A. (2023). The Waste Ban in China: What Happened Next? Assessing The Impact of New Policies on The Waste Management Sector in China. *Environmental Geochemistry and Health*, 45(4), 1117–1131. <https://doi.org/10.1007/s10653-021-01101-y>
- Te'dang Gina Soniang. (2020). *Implementasi Konvensi Internasional Basel Terhadap Impor Sampah di Tiongkok*. 4(1).
- The Global Economy. (2018). *China: Carbon Dioxide (CO₂) Emissions*.
- Unfried, K. ;, & Wang. (2024). *Importing air pollution? Evidence from China's plastic waste imports*. <http://hdl.handle.net/10419/263434>
- Wahab, S. N., & Lim, F. Y. J. (2022). CHINA'S NATIONAL SWORD POLICY REACTION TO SOUTHEAST ASIA'S WASTE TRADE AND THE

- TRANSITION TO A CIRCULAR ECONOMY. *Journal of Technology and Operations Management*, 17(No.1), 1–10.
<https://doi.org/10.32890/jtom2022.17.1.1>
- Wen, z. (2021). China's Plastic Import Ban Increases Prospects of Environmental Impact Mitigation of Plastics Waste Trade Flow Worldwide. *Nature Communications*. In *Journal of International Studies* (Vol. 2, Number 3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41467-020-20741-9>
- Wicaksono, W. S., Rosyidin, M., & Hanura, M. (2022). Kebijakan *National Sword*: Respons Tiongkok Dalam Menghadapi Impor Limbah Bahan Baku. In *Journal of International Relations* (Vol. 8). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi> Website: <http://www.fisip.undip.ac.id>
- World Bank Group. (2018). *What A Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0>
- Wu, D., Li, Q., Shang, X., Liang, Y., Ding, X., Sun, H., Li, S., Wang, S., Chen, Y., & Chen, J. (2021). Commodity Plastic Burning as a Source of Inhaled Toxic Aerosols. *Journal of Hazardous Materials*, 416.
<https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125820>
- Xinhua. (2020). *In green milestone, China to end solid waste imports*.
- Xu, Q., Xiang, J., & Ko, J. H. (2020). Municipal plastic recycling at two areas in China and heavy metal leachability of plastic in municipal solid waste. *Environmental Pollution*, 260. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114074>
- Ye, X. (2019). Rediscovering the Transition in China's National Interest: A Neoclassical Realist Approach. *Journal of Current Chinese Affairs*, 48(1), 76–105. <https://doi.org/10.1177/1868102619876830>
- Yoshida, A. (2022a). China's Ban of Imported Recyclable Waste and Its Impact on The Waste Plastic Recycling Industry in China and Taiwan. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 24(1), 73–82.
<https://doi.org/10.1007/s10163-021-01297-2>

- Yoshida, A. (2022b). China's ban of imported recyclable waste and its impact on the waste plastic recycling industry in China and Taiwan. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 24(1), 73–82.
<https://doi.org/10.1007/s10163-021-01297-2>
- Zhang, J., Wu, X., Guo, H., Zheng, X., & Mai, B. (2021). Pollution of plastic debris and halogenated flame retardants (HFRs) in soil from an abandoned e-waste recycling site: Do plastics contribute to (HFRs) in soil? *Journal of Hazardous Materials*, 410. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.124649>
- Zhu, J., Fan, C., Shi, H., & Shi, L. (2021). Efforts for a Circular Economy in China: A Comprehensive Review of Policies. *Journal of Industrial Ecology*, 23(1), 110–118. <https://doi.org/10.1111/jiec.12754>
- Brooks, A. L., Wang, S., & Jambeck, J. R. (2018). The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade. *Science Advances*, 4(6), eaat0131. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aat0131>
- Brown, A., dkk. (2025). Monitoring Trade in Plastic Waste and Scrap 2025. Environment Working Paper.
- Bryman, A., & Bell, E. (2019). *Social Research Methods* (Fifth Canadian edition). Oxford University Press.1
- Chen, D. M. C., Bodirsky, B. L., Krueger, T., Mishra, A., & Popp, A. (2020). The world's growing municipal solid waste: trends and impacts. *Environmental Research Letters*, 15(7), 074021.
- China Announces Imports Ban on 32 Types of Solid Waste. 2018. MEE CHINA. https://english.mee.gov.cn/News_service/media_news/201804/t20180419_434969.shtml
- China Plastic Waste Reduction Project: Project Information Document (PID). (2021). World Trade Bank.
- China to Ban All Imports of Solid Waste From 2021. 2020. Xinhua. MEE CHINA. https://english.mee.gov.cn/News_service/media_news/202011/t20201130_810429.shtml

- China's Import Ban on Solid Waste Queried at Import Licensing Meeting. 2017. World Trade Organization. https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/impl_03oct17_e.htm
- Cotta, B. (2020). What goes around, comes around? Access and allocation problems in Global North–South waste trade. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 20(2), 255-269.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Third Edition). SAGE.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth Edition). SAGE, K., & Feng, Y. (2022). China's regulatory respon to plastic pollution: Trends and trajectories. *Frontiers*, DOI 10.3389/fmars.2022.982546.
- Gondogdu, S., et al. (2025). *The Global Plastic Treaty must include strict global controls on plastic waste trade*. Cambridge Prisms. Cambridge University Press.
- Heiges., and Kate, O. (2022). *A Recycling Reckoning: How Operation National Sword catalyzed a transition in the U.S. plastics recycling system*. Elsevier.com.
- Huang, Q., et al. (2020). Modeling the global impact of China's ban on plastic waste imports. Elsevier.
- Ishimura, Y., Ichinose D., & Nomura, K. (2024). *Plastic Waste Trade and Internasional Agreements*. Environmental Economic and Policy Studies.
- Kellenberg, D. (2012). Trading wastes. *Journal of Environmental Economics and Management*, 64(1), 68-87.
- Li, B., Alleyne, A., Zhang, Z., & Mu, Y. (2021). Sustainability and waste imports in China: pollution haven or resources hunting. *Sustainability*, 13(2), 932.
- Lin, dkk. (2023). Impact of China's *National Sword* Policy on waste import:A difference-in-differences approach. ScienceDirect, 78. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.04.033>
- Liu, C., and Liu, C. (2023). Exploring Plastic Management Policy in China: Status, Challenges and Policy Insight. *Sustainability*.

- Liu, J., Yang, et al. (2021). The Value of China's Legislation on Plastic Pollution Prevention in 2020. *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*.
- Martínez, J. H., Romero, S., Ramasco, J. J., & Estrada, E. (2022). The world-wide waste web. *Nature communications*, 13(1), 1615.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saladana, J. (2014b). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Sage.
- Parajuly, K., and Coliln Fitzpatrick. (2020). Understanding the Impacts of Transboundary Waste Shipment Policies: The Case of Plastic and Electronic Waste. *Suistanaibility*.
- Qu, S., Guo, Y., Ma, Z., Chen, W. Q., Liu, J., Liu, G., & Xu, M. (2019). Implications of China's foreign waste ban on the global circular economy. *Resources, Conservation and Recycling*, 144, 252-255.
- Romee., E., and Marel, D. (2022). Trading Plastic Waste in a Global Economy: Soundly Regulated by the Basel Convention?. *Journal of Environment*. Oxford.
- Sandelowski, M. (2000). Focus on Research Methods: Whaetever Happended to Qualitative Description. University of North Carolina.
- Setyani, S. (2020). Analisis Ekspor dan Impor Limbah Padat Antara Cina dan Amerika Serikat: *Operation Green Fence (2013) dan Operation National Sword (2018)*. Universitas Pelita Harapan. https://www.researchgate.net/publication/342132901_Analisis_Ekspor_Dan_Impor_Limbah_Padat_Antara_Cina_Dan_Amerika_Serikat_Operation_Green_Fence_2013_Dan_Operation_National_Sword_2018_Analysis_Of_Solid_Waste_Exports_And_Imports_Between_China_And_The_Un
- Shi, J., Zhang, C and Chen, W, Q. (2020). The Expansion and shrinkage of the international trade network of plastic wastes affected by China's waste management policies. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.08.005>
- Uhm, Y. (2021). Plastic Waste Trade in Southeast Asia After China's Import Ban: Implications of the New Basel Convention Amendment and

- Vedantam, A. et al. (2022). Impact of China's *National Sword* Policy on the U.S. Landfill and Plastics Recycling Industry. Sustainability. MDPI. <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/4/2456>
- Wang, C., et al. (2020). Structure of the global plastic waste trade network and the impact of China's import ban. Elsevier.
- Wen, Z., Xie, Y., et al. (2021). China's Plastic Import Ban Increases Prospects of Environmental Impact Mitigation of Plastics Waste Trade Flow Worldwide. Nature Communications. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-20741-9>
- Wijaya, P. (2022). ANALISIS ALASAN CHINA DALAM KEBIJAKAN *NATIONAL SWORD*: LARANGAN IMPOR LIMBAH.
- Wong, S. 2017. New world order: China's *National Sword* policy and its future ban on certain types of plastic scrap are affecting global markets. <https://www.recyclingtoday.com/article/national-sword-china-plastics-recycling/>
- Yamei. U.S. City's Recycling Efforts Impacted by China's Waste Ban Policy. 2019. Xinhua. https://www.xinhuanet.com/english/2019-01/14/c_137742968.htm
- Yanan, et al. (2020). Life Cycle Environmental Implications Of China's Ban on Post Consumer Plastics Import. UC Santa Barbara Previously Publish Works.